

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu menginginkan kesejahteraan demi kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan menjadi tujuan nasional negara Indonesia yang sejak dahulu hingga sekarang masih didambakan oleh masyarakatnya. Hal ini sudah jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Sudah jelas bahwasanya negara Indonesia menginginkan setiap warganya di manapun berada untuk merasakan kesejahteraan.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia terus diberdayakan demi mencapai tujuan nasional (Dewi Kurniasari, 2013, hal. 78). Berbagai macam program, kebijakan dan peraturan juga dibuat dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena untuk terciptanya kesejahteraan sosial itu banyak hal yang harus dilakukan oleh negara.

Setiap warga negara berhak menerima kesejahteraan, hal ini sejalan dengan paradigma institusional menurut Hardiker, dkk. Dalam jurnal “*Kesejahteraan Sosial*” karangan Adi yang menyatakan bahwa “dalam kaitan dengan peran negara dalam penyediaan layanan kesejahteraan pada masyarakatnya, paradigma ini melihat pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta dan organisasi nirlaba dalam meningkatkan kualitas layanan. Hal ini dilakukan karena usaha

kesejahteraan sosial dianggap sebagai hal yang mutlak diperlukan serta fungsional untuk mencapai integrasi sosial” (Adi, 2013).

Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Selain pemerintah, peran warga negara juga penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, warga negara merupakan salah satu unsur dari negara itu sendiri yang dimana negara dan warganegara mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajibannya.

Organisasi sangat penting bagi manusia sebagai salah satu wadah untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Melalui organisasi, manusia dapat mencapai tujuannya dengan cara bekerja. Sebuah organisasi memerlukan alat untuk mengatur jalannya organisasi sehingga efisien, efektif, dan terwujudnya tujuan yang diinginkan (Rachman, 2015, hal. 293). Sebagai wadah bagi warga negara untuk mencapai kesejahteraan sosial, organisasi menjadi salah satu komponen partisipasi sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan karena sebagai upaya pemberi solusi dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, organisasi lokal dituntut berperan dalam penggerak masyarakat dalam pembangunan. Organisasi lokal di lingkungan desa/kelurahan merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan ataupun pemecahan permasalahan masyarakat, salah satu organisasi yang bisa mewadahi hal tersebut adalah Karang Taruna.

Karang Taruna merupakan salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri dan berorganisasi sejak dini. Berpartisipasi dalam Karang

Taruna, pemuda dapat mengembangkan diri dan kreativitas dapat disalurkan. Tugas Pokok dan Fungsi Karang Taruna adalah sebagai tempat pengembangan diri (pemberdayaan pemuda). Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Karang Taruna cukup strategis dan sangat penting untuk pemberi solusi ataupun penyelesaian masalah sosial yang ada. (Riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial). Dari segi kuantitatif, jumlah Karang Taruna yang terdapat di Indonesia mempunyai potensi besar sebagai pemberdayaan generasi muda.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, jumlah Karang Taruna telah mencapai lebih dari 65.000 organisasi. (Riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial). Namun, jika ditinjau dari segi kualitas sebagian besar (75,65%) masih memerlukan pembinaan. Pendayagunaan potensi dan posisi strategis untuk pengembangan potensi generasi muda relative belum optimal. Kondisi ini tercermin dari jumlah Karang Taruna dan percontohan baru mencapai 20,35%, Kondisi ini juga tercermin dari hasil penelitian penjajagan tentang kondisi Karang Taruna yang dilakukan oleh Balatbangsos (2002).

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berdiri karena kepedulian yang dirasakan kaum muda atas berbagai permasalahan sosial yang ada (Febri Fajar Pratama, 2018, hal. 172). Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 77/HUK/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna “Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berada di desa/kelurahan dalam upaya terciptanya kesejahteraan sosial. Tujuan Karang Taruna untuk mengembangkan dan meningkatkan cipta, karsa, dan karya pemuda dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Organisasi Karang Taruna tumbuh, berkembang, dikelola oleh generasi muda, dan untuk kepentingan semua masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Berdasarkan hal tersebut, setiap Karang Taruna yang ada dapat dikembangkan demi terciptanya kesejahteraan desa/kelurahan sendiri (Susanto, 2015, hal. 422).

Sebagai bagian dari warga negara, pemuda merupakan penggerak (*agent of change*), menentang sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur menjadi landasan untuk bergerak dengan semangat perubahan. sejarah mencatat pada tahun 1928 gerakan pemuda mempengaruhi semangat rakyat Indonesia untuk merdeka, dan terlahirnya organisasi-organisasi kepemudaan dengan istilah “*jong*” atau dalam artian pemuda. Berhasil memaksa Bung Karno untuk memproklamkan kemerdekaan dan menekan kaum imperialis. Meski kala itu Bung Karno lebih condong memilih diplomasi daripada perang (Febri Fajar Pratama, 2018, hal. 172).

Saat ini jumlah penduduk indonesia mencapai 265 juta jiwa. Indonesia sedang mengalami bonus demografi semenjak tahun 2012, menurut perhitungan

puncaknya pada tahun 2028-2030. Diperkirakan proporsi penduduk usia produktif dapat meningkat hingga 68,1% di tahun 2028-2030 (Lessy, 2017).

Begitu luar biasanya peran pemuda bagi negara Indonesia pada saat dulu, dan kini Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang bisa dimanfaatkan demi kebaikan bangsa terutama peran pemuda sebagai *agent of change*, sudah seharusnya peran dan semangat pemuda harus dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi negara ini. Diperlukan pula *civic engagement* (Keterlibatan Warga negara), karena dengan adanya *civic engagement* maka akan mempermudah berbagai kegiatan dalam upaya terciptanya kesejahteraan sosial.

Lembaga-lembaga internasional seperti *World Development Report* menyoroti pelaksanaan kewarganegaraan aktif sebagai salah satu kegiatan paling penting untuk transisi yang sehat menuju kedewasaan. Ketertarikan pada konsep ini didorong oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tentang penurunan yang dirasakan dalam tingkat *civic engagement* dan politik diantara pemuda di dunia. Melihat *civic engagement* sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat. *civic engagement* Sangat penting dimiliki oleh pemuda, baik untuk penciptaan kesejahteraan sosial melalui keterlibatannya dalam organisasi sosial seperti Karang Taruna, maupun dalam menciptakan demokrasi yang sehat.

Melihat fenomena saat ini dimana banyak problematika pemuda mulai dari pengangguran, krisis mental, krisis eksistensi, hingga dekadensi moral. Budaya permisif dan pragmatisme menyebar mengakibatkan sebagian pemuda menjadi mempunyai hidupan yang serba instan, dan tercabut dari idealisme sehingga

cenderung menjadi anti sosial (Anggraini, 2018). Menurut Toni Susanto bahwa peran pemuda sudah menurun drastis, dulu pemuda sangat berperan aktif dalam kerja bakti, acara-acara keagamaan, adat istiadat. Sedangkan sekarang ini pemuda lebih suka kesenangan, bermain-main. Saat ini juga pemuda-pemudi lebih suka berperan di dunia maya daripada dunia nyata, seperti lebih aktif di *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Instagram* dan lainnya (Susanto, 2015, hal. 422).

Masalah mengenai menurunnya peran pemuda dalam kegiatan-kegiatan sosial turut dirasakan oleh pemuda Cakung Barat. Awalnya pemuda-pemuda Cakung Barat tidak aktif sama sekali dalam kegiatan sosial dan organisasi sosial seperti Karang Taruna, Karang Taruna Cakung Barat juga tidak aktif (pasif) dan tidak terlihat dalam program-program untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengatasi berbagai masalah yang ada. Masalah ini mulai terkikis sejak 2016 dan sampai sekarang menjadi karang taruna yang cukup aktif. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di Karang Taruna Cakung Barat, peneliti mendapatkan data bahwasanya FA selaku ketua umum Karang Taruna Cakung Barat mengatakan

Memang Karang Taruna Cakung Barat baru mulai aktif tahun 2016 sejak saya menjabat sebagai Ketua Umum, sebelumnya ada Karang Taruna Cakung Barat tapi tidak aktif, sebenarnya pemuda Kelurahan Cakung Barat mempunyai potensi untuk aktif, tapi tidak ada penggeraknya, jadi disitulah saya mulai menumbuhkan lagi Karang Taruna Cakung Barat. Alhamdulillah selang 1 tahun yakni 2017 Karang Taruna Cakung Barat mendapat berbagai penghargaan

Pada tahun lalu yakni 2018 Karang Taruna Kelurahan Cakung Barat mewakili DKI Jakarta dalam lomba karang taruna teladan tingkat nasional. (Ifand, 2018), mendapat penghargaan juara 1 Karang Taruna Berprestasi Provinsi Jakarta

ditahun 2018, mendapat penghargaan sebagai juara 1 Karang Taruna Berprestasi Jakarta Timur ditahun 2017, dan juara 2 Karang Taruna Berprestasi Provinsi Jakarta 2017. Karang Taruna Cakung Barat ini sebagai contoh teladan yang patut ditularkan kepada seluruh warga terutama para generasi mudanya di wilayah Jakarta Timur (Akbar, 2018).

Cukup banyak penghargaan yang diterima karang taruna cakung barat dalam kurun waktu 3 tahun sejak kembali aktifnya karang taruna, tetapi ternyata masalah mengenai menurunnya peran pemuda masih terjadi sampai sekarang di Karang Karuna Cakung Barat, berdasarkan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan di Karang Tarun Cakung Barat, bahwasanya FA selaku Ketua Umum Karang Taruna Cakung Barat mengatakan bahwa

Permasalahan di Karang Taruna Cakung Barat salah satunya adalah banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna Cakung Barat. Itu PR saya sebagai ketua untuk bisa menumbuhkan semangat dan keterlibatan mereka untuk karang taruna

Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan dari ABS selaku Ketua Divisi Wakil Ketua Divisi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna Cakung Barat, yakni

Memang saat ini banyak pengurus dan anggota Karang Taruna Cakung Barat yang sudah tidak aktif dan pasif, bahkan ketika saya dan pengurus lain ke kelurahan, pihak kelurahan bilang “kamu lagi-kamu lagi yang aktif, pengurus lainnya mana?”

Dari penelitian pendahuluan tersebut dapat dilihat bahwa ketua mempunyai dampak terhadap pengurus dan anggotanya dalam membuat Karang Taruna yang dulunya tidak aktif sama sekali menjadi cukup aktif walaupun saat ini masih banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif terlibat dalam kegiatanlegiatan Karang Taruna Cakung Barat, ternyata setiap pemimpin dalam sebuah organisasi

ataupun lembaga akan menerapkan gaya kepemimpinan tertentu yang sesuai dengan kondisi dari organisasi yang dinaunginya, karena gaya kepemimpinan memiliki hubungan klausualitas yang tinggi dengan motivasi kerja, mempunyai pengaruh secara signifikan dan linier terhadap motivasi kerja (Siwij, 2018, hal. 25). Selain itu berdasarkan jurnal *Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kelurahan di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang* menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara dominan dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai (Ato'illah, 2014, hal. 1), , kemudian berdasarkan jurnal *Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Keterikatan Kerja Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Air* menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan kerja (Supriatna, 2018, hal. 101)

Selain permasalahan pada terdapatnya pengurus dan anggota yang tidak aktif di Karang Taruna Cakung Barat, terdapat permasalahan lain mengenai SKKT (Sasana Krida) Karang Taruna Cakung Barat, seperti yang diungkapkan oleh ABS selaku ketua bidang olahraga dan seni

Karang Taruna Cakung Barat tidak memiliki SKKT (Sasana Krida) tempat untuk berkumpul dan bekerja, untuk menutupi kekurangan itu kami membangun rumah pintar digital yang dulunya tempat ini merupakan kandang kambing dan lahan yang tidak terpakai, terus kami renovasi sendiri dan jadilah rumah pintar digital

Melihat fenomena dan masalah yang terjadi pada pemuda dan fakta di Karang Taruna Cakung Barat, Jakarta Timur. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gaya kepemimpinan ketua karang taruna dalam upaya penguatan *civic engagement* di Kelurahan Cakung Barat.

B. Fokus Masalah

Untuk kepentingan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti perlu memfokuskan permasalahan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan mendalam, maka penelitian yang akan dilakukan ini difokuskan pada gaya kepemimpinan ketua karang taruna dalam penguatan *civic engagement* di Kelurahan Cakung Barat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Gaya kepemimpinan seperti apa yang digunakan Ketua Karang Taruna Kelurahan Cakung Barat?
2. Bagaimana dampak gaya kepemimpinan Ketua Karang Taruna dalam penguatan *civic engagement* di Kelurahan Cakung Barat?

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan *civic*, bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terutama mengenai gaya kepemimpinan ketua karang taruna dalam penguatan *civic engagement*

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemangku

kepentingan di masa yang akan datang. Khususnya terhadap gaya kepemimpinan ketua karang taruna dalam penguatan *civic engagement*.